

**OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI  
KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI  
KABUPATEN BONE**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial  
pada Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**IRMALASARI**  
**NIM: 50300116072**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2020**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmalasari  
Nim : 50300116072  
Tempat/Tgl. Lahir : Taretta, 1 Juli 1998  
Jur/Prod/Konsentrasi : PMI/ Kesejahteraan Sosial  
Fakultas/Program : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Perumahan Danau Alam Pendidikan Blok B No. 11  
Judul : Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai  
Terhadap  
Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan-Mampotu  
Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Agustus 2020

Penyusun,



Irmalasari

NIM: 50300116072

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone", yang disusun oleh Irmalasari, NIM: 50300116072, mahasiswa Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 M, bertepatan dengan 6 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Jurusan PMI Kesejahteraan Sosial.

Gowa, 25 Agustus 2020 M.  
6 Muharram 1442 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Hasaruddin, M.Ag
Sekretaris	: Dr. Hamriani, S.Sos.I, M.Sos.I
Munaqisy I	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si
Munaqisy II	: Dr. St. Aisyah BM, M. Sos I
Pembimbing I	: Dr. Syamsuddin AB, S.Ag, M.Pd
Pembimbing II	: Dr. Sakaruddin Mandjarreki, S.Sos, M.Si

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar

Dr. Firdaus Muhammad, M.A  
NIP. 19760220 100501 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغِيثُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad saw. yang telah menyebarkan permadani-permadani islam,serta mampu kita jadikan tauladan, beliaulah yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada ummat manusia.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa berhasilnya penulis dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai rector, Prof. Dr. Mardan, M.Ag sebagai Wakil Rektor I (Bidang Akademik Pengembangan

lembaga), Dr. Wahyuddin, M.Ag sebagai Wakil Rektor II (Bidang Adm. Umum dan perencanaan Keuangan), Prof. Dr, Darussalam, M.Ag sebagai Wakil Rektor III (bidang Kemahasiswaan), Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M,Ag Sebagai Wakil Rektor IV(Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga), serta seluruh staf Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah berusaha mengembangkan dan menjalankan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi kampus yang bernuansa islam, mulia, berbudi pekerti luhur, dan beriptek.

2. Dr. Firdaus Muhammad, MA., sebagai Dekan, Dr. Irwan Misbach, SE., M.Si, sebagai Wakil Dekan I, Dr. Hj. Nurlelah abbas. Lc, M.A, sebagai Wakil Dekan II, Dr. Irwanti said, M.Pd sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Prof. Dr. H. Hasaruddin, M.Ag dan Dr. Sakaruddin Mandjarreki, S.Sos,M.Si sebagai Ketua dan Sekertaris Jurusan PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial.
4. Dr. Syamsuddin AB, M.Pd dan Dr,Sakaruddin Mandjarreki, S.Sos,M.Si sebagai Pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si. dan Dr. St. Aisyah BM, M.Sos.I selaku penguji I dan penguji II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Umum dan Akademik, bersama seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberi ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat serta pelayanan terbaik.
7. Teman-teman PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial angkatan 2016 dan terkhusus teman-teman saya Nurhumairah, Rista, Razaq, Amin, Rahim, Andi Eka Purnamasari S.ked, echy cikma susanti, Heri dan Keluarga tercinta yang selalu membantu dan mensupport peneliti.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua, Bapak Arifin dan Ibunda Nurtang, ucapan terima kasih yang tak terhingga karena telah bekerja keras untuk membiayai proses pendidikan peneliti dan memberikan dukungan, motivasi, nasehat, serta doa sehingga peneliti bisa sampai pada titik akhir proses ini.

Gowa, 25 Agustus 2020  
Penyusun

Irmalasari  
NIM: 50300116072

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1-11
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	12-39
A. Tinjauan Tentang Optimalisasi.....	12
B. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) .....	14
C. Kesejahteraan .....	24
D. Rumah Tangga Miskin .....	28
E. Teori Perubahan Sosial.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Instrumen Penelitian .....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

BAB IV	OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA.....	47-71
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
	B. Bentuk Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kelurahan Mampotu KecamatanAmali Kabupaten Bone .....	52
	C. Penunjang dan Penghambat Progra, Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di KelurahanMampotuKecamatan Amali Kabupaten Bone ....	64
BAB V	PENUTUP.....	71-74
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Implikasi Penelitian .....	72
	DAFTAR PUSTAKA .....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
	RIWAYAT HIDUP.....	90



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Amali .....	49
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan .....	50
Tabel 1.3 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone .....	51

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kf	K	Ka
ل	Lm	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau-la*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

: *ma>ta*

رَمَى : *rama>\|*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### D. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## ABSTRAK

**Nama : Irmalasari**  
**NIM : 50300116072**  
**Judul : Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan 2 sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone? 2) Bagaimana faktor penunjang dan penghambat Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, belum bisa dikatakan optimal atau belum berjalan dengan baik, sedangkan dimana program ini merupakan langkah pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi, mendorong keuangan inklusif ,dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang. permasalahan yang sering di dapat khususnya di Kelurahan Mampotu yaitu bantuan tersebut masih ada ketidak tepat sasaran atau adanya ketidak konsistenan jadwal penyaluran Bantuan setiap bulannya.

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) perlu dilakukan evaluasi dan pendataan ulang, 2) perlunya pemahaman masyarakat terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kacamatan Amali supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, 3) diharuskan adanya upaya atau tidak stretegis untuk menyelesaikan barbagai hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mampotu.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia khususnya di Indonesia, kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan maupun kesehatan.

Berdasarkan konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir ditengah-tengah masyarakat kita dan bahkan gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia yang memuncak pada periode 1997-1998. Setelah dalam kurung waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkatkan kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Populasi penduduk miskin yang cukup besar tersebut merupakan beban yang masih cukup berat bagi negara maupun Pemerintah Indonesia. Disebabkan oleh beberapa faktor yaitu SDM yang kurang memadai, kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat

---

<sup>1</sup>Syamsuddin AB, *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, Cet; I (Jawa Timur: Wade, 2017), h.79-82.

rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran. Gambaran kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Tingkat kemiskinan rumah tangga dapat digambarkan dengan pendapatan dan pola pengeluarannya. Pendapatan yang rendah menyebabkan daya beli juga rendah sehingga rumah tangga miskin melakukan pilihan dalam membelanjakan pendapatannya, bahkan mungkin harus meniadakan beberapa kebutuhan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Kriteria keluarga miskin menurut Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan *basic needs* (dasar keinginan), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batasan kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain, adapun kriteria menurut BPS, ada 14 kriteria untuk memenuhi keluarga atau rumah tangga miskin yaitu: a) luas bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter perorang, b) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, rumbia, dan kayu murahan, c) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplaster, d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lainnya, e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, f) sumber air minimum berasal dari

---

<sup>2</sup>Suradi dan Mujiyati, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Cet I (Jakarta: P3KS, 2009), h.6



sumur atau mata air tidak terlindung, sungai, dan air hujan, g) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah, h) hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu, i) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, j) hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari, k) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik, l) sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- ( Enam ratus ribu) per bulan, m) pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak bersekolah, tidak tamat SD atau hanya SD,n) tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit atau non- kredit, emas, ternak, kapal, motor, atau barang modal lainnya.<sup>3</sup>

Penyediaan pangan terutama beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau tetap merupakan prioritas utama pembangunan,oleh karena itu pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam hal ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturanyang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan.Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

---

<sup>3</sup> Kementerian Sosial Republic Indonesia, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan* Tahun 2011 (Jakarta:Kementerian Sosial RI, 2011),h 24-25

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan ditempat yang telah bekerja sama dengan Bank Himbara.<sup>4</sup>

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuanan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program BPNT ini dapat mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Skema Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

---

<sup>4</sup> Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta 2017.h5.

elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gual, tepung, minyak goreng dan lain-lain) melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Selain itu penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)

Calon KPM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran ditempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara parallel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor kabupaten.

Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengembalian bantuan pangan<sup>5</sup>. Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Meskipun program Bantuan Pangan Non Tunai sudah diterapkan oleh pemerintah, namun masih perlu dipertanyakan apakah proses penyaluran BPNT

---

<sup>5</sup><https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

sudah optimal, khususnya di Kecamatan Amali Kabupaten Bone masih ada rumah tangga yang dikategorikan keluarga miskin yang berhak menerima BPNT akan tetapi mereka belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat(KPM), begitupun sebaliknya ada keluarga yang tidak layak menerima bantuan BPNT tetapi mereka terdaftar jadi KPM.

Sehingga penulis tertarik untuk menulis Karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:“**Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone**”.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga atau keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

### **2. Deskripsi Fokus**

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian tersebut, adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu:

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau pencapaian hasil yang sudah maksimal, atau sepenuhnya sempurna fungsional atau lebih efektif.

b. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan bank.

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah menunjukkan suatu kondisi yang baik, kondisi yang dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

d. Rumah Tangga Miskin

Rumah tangga miskin adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran (untuk konsumsi rumah tangga) perkapita perbulan kurang dari garis kemiskinan.

e. Teori perubahan sosial

Perubahan sosial merujuk kepada perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, komposisi penduduk, material, kebudayaan dan ideologi

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi masalah dalam beberapa sub pertanyaan yang mendasar dalam pembahasan “Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap

kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone”.

Untuk lebih kongkritnya, penulis akan menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?
2. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone?

#### **D. *Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksud oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Optimalisasi Program Bantuan Pangan Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi atas nama Silvie Maulidina, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasunda Bandung, 2018. Dengan Judul Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus Pada Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Bojongloa Kaler). Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep kemiskinan, stratifikasi kemiskinan, juga membahas tentang rumah tangga miskin, dan

mejelaskan kriteria untuk menentukan keluarga/ rumah tangga miskin serta sumber-sumber penerima rumah tangga miskin.<sup>6</sup>

2. Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, 2018. *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*. Isi buku ini membahas mengenai Efektivitas Dan Ketetapan Sasaran Penyaluran Bantuan Sosial, Kriteria Dan Persyaratan Bantuan Pangan Non Tunai, Koordinasi Pelaksanaan, Pembiayaan Dan Tenaga Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>7</sup>
3. Tubagus Achmad Choesni. *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, Jakarta, 2016. Isi buku ini membahas tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank penyalur, kemudian KPM dapat menukar Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan melalui e-warung, yaitu di Pasar Tradisional, Warung, Toko Kelontong E-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan (LDK) Yang Menjual Bahan Pangan, Atau Eceran.<sup>8</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan tujuan kegunaan penelitian.

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

---

<sup>6</sup>Silvie, Maulidina. *Skripsi Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Miskin*, (Bandung : Universitas Pasunda, 2018)

<sup>7</sup> Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta, 2018), h. 8-9

<sup>8</sup>Thubagus Achmad Choesni. *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta 2016) h.10

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penunjang optimalisasi program bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara lain:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Bagi Mahasiswa jurusan PMI-Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar hasil penelitian tersebut dapat menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Menambah wawasan berfikir tentang bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone
- 2) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesejahteraan sosial, dan bagi pembaca dalam membangun kepedulian sosial dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi penulis yang lain
- 3) Menambah pengalaman dan pengetahuan penelitian tentang usaha pendamping bantuan sosial dalam memberikan pelayanan kepada rumah tangga miskin atau penerima manfaat.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Memberikan informasi yang bukan hanya dijadikan sekedar teori, bahkan dapat membantu pemerintah dalam memberika pemahaman kepada



masyarakat mengenai Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin atau keluarga penerima manfaat.

- 2) Memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Optimalisasi***

##### ***1. Pengertian Optimalisasi***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna fungsional atau lebih efektif.<sup>9</sup> Menurut Winardi Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau target.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Menurut beberapa para ahli pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut winardi (1999, h. 363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi

---

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994. H.800.

<sup>10</sup> Winardi 1999. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

- b. adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.
- c. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

## **2. Optimalisasi pembelajaran**

Optimalisasi proses pembelajaran adalah upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga para siswa mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar. Optimalisasi proses pembelajaran dimaksudkan untuk memperbaiki aspek-aspek pembelajaran yang masih kurang optimal. Kegiatan tidak lanjut dimulai dengan merancang dan mengajukan berbagai solusi alternatif berdasarkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran ditandai adanya upaya disengaja, terencana dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Optimalisasi kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh sebagai faktor, diantaranya faktor metode atau teknik mengajar guru. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang yang

bervariasi sehingga peserta didik merasa pembelajaran menjadi lebih bermakna atau memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Optimalisasi proses pembelajaran yaitu proses atau cara mengoptimalkan kegiatan peserta didik untuk belajar sedangkan guru berperan untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar atau membelajarkan peserta didik.

## **B. Bantuan pangan Non Tunai**

### **1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketetapan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tetap sasaran dan tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program BPNT. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di Kabupaten/kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota atau kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Raskin juga dialihkan menjadi bantuan sosial, Dengan demikian, mulai 2018, bantuan pangan akan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau disalurkan ke masing-masing

---

<sup>11</sup>Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai*, Jakarta, 2018, h 4

kabupaten/kota dalam bentuk atau Natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana pra sarana penyaluran non tunai belum memadai, tetapi menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>12</sup>

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui jaringan system pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan bank penyalura, principal, dan perusahaan switching. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan pangan melalui e-warong, yaitu pasar tradisional, warung, took kelonton, e-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau sesuai eceran lainnya.<sup>13</sup>

## **2. Kriteria Bantuan Pangan Non Tunai**

BPNT disalurkan di lokasi kabupaten kabupaten/ kota yang memiliki fasilitas jaringan komunika/ internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT serta e-warong. Bank penyaluran mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan atau pihak lain untuk dapat menjadi E- warong sebagai penyaluran BPNT dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulusan proses uji tuntas (due

---

<sup>12</sup>Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakrta 2017.h 2-5

<sup>13</sup>Tubagus Achmad Choesni, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta 2016.h 2-3

diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank penyaluran.

- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/ atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antara agen/ took dengan pemasok/ distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- d. Menjual beras dan atau telur sesuai harga pasar
- e. Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan dan
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lanjut Usia dan KPM disabilitas.

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, dan atau Toko Tani Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok bagi e-warong dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. Namun, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa beserta unit usahanya, dan atau Toko Tani Indonesia tidak dapat menjadi e-warong. Jumlah KPM BPNT yang dilayani oleh e-warong paling banyak 250 KPM BPNT.

### **3. Persyaratan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Peserta BPNT adalah KPM yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. KPM yang diutamakan adalah peserta Program Keluarga Harapan.

Daftar KPM BPNT paling sedikit membuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- b. Alamat pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- c. Tanggal lahir pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.
- d. Nomor induk kependudukan pasangan kepala keluarga/istri/pengurus
- e. Nama gadis ibu kandung pasangan kepala keluarga/istri/pengurus dan,
- f. ID BDT pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.<sup>14</sup>

#### **4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

- a. Registrasi dan pembukaan rekening.
  - 1) Mekanisme Pemberitahuan kepada KPM BPNT.

Direktur yang menagani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran memberitahukan daftar KPM perdesa, kelurahan, nama lain dengan disertai salinan lunak atau softcopy kepada bupati atau walikota, tim koordinasi bansos pangan daerah kabupaten atau kota, dan kepala organisasi perangkat daerah urusan sosial kabupaten atau kota. Kemudian bupati atau kota, dan kepala organisasi perangkat daerah urusan sosial kabupaten atau kota berkoordinasi dengan bank penyaluran pemadanan data KPM BPNT, jadwal registrasi, pengumuman atau pemberitahuan kepada KPM BPNT untuk melakukan registrasi, dan pelaporan hasil registrasi.

Surat pemberitahuan kepada KPM BPNT terkait status kepesertaannya berisi informasi berikut:

- a) Informasi identitas KPM yang terdiri atas:

- (1) Nama pasangan kepala keluarga (pemilik rekening)

---

<sup>14</sup>Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republic Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, h.9

- (2) Nama kepala keluarga
  - (3) Nama anggota keluarga (lainnya)
  - (4) Alamat tinggal keluarga
  - (5) Nomor induk kependudukan
  - (6) Kode unik KPM BPNT dalam data terpadu program penanganan fakir miskin
  - (7) Kode unik individu dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan
  - (8) Nomor peserta Program Keluarga Harapan (jika ada)
- b) Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar KPM BPNT.
- c) Informasi bahwa KPM BPNT yang namanya tertera di dalam format pemberitahuan harus mengikuti proses registrasi KPM BPNT yang waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui perangkat desa, kelurahan, dan nama lain.
- d) Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM BPNT untuk mengikuti proses registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas asli berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari KPM BPNT.
- e) Formulir pembukaan rekening yang diperoleh dari kantor cabang bank penyaluran disampaikan kepada KPM BPNT bersama surat pemberitahuan untuk dilengkapi dengan dokumen yang syarat pembukaan rekening oleh KPM BPNT.



## 2) Pelaksanaan Registrasi

- a) KPM BPNT menerima surat pemberitahuan dari bupati atau wali kota, tim koordinasi bansos pangan daerah kabupaten atau kota, dan kepala organisasi perangkat daerah urusan sosial kabupaten atau kota untuk datang dengan membawahi dokumen pendukung registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas (kartu tanda penduduk asli, kartu keluarga, dan kepersertaan Program Keluarga Harapan). Selanjutnya dokumen di periksa validitas kelengkapannya oleh perangkat desa, kelurahan dan nama lain.
- b) Petugas bank penyaluran mencocokkan kesesuaian data kartu kombo dan kelengkapannya dengan dokumen identitas yang dibawa oleh KPM BPNT. Terdapat 2 kemungkinan hasil pencocokan data, yaitu data sesuai dan data tidak sesuai.

## **b. Edukasi dan Sosialisasi**

Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh bank penyalur, direktorat jenderal penanganan fakir miskin, dan pemerintah daerah.

- 1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- 2) Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada KPM BPNT, pendamping sosial bantuan sosial pangan, dan aparat pemerintah daerah
- 3) Edukasi dan sosialisasi dibantu oleh pendamping sosial bantuan sosial pangan

- 4) Edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivitas kartu kombo

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada:

- a) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepadapemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh:

- (1) Direktorat jenderal penanganan fakir miskin
- (2) Bank penyalur dan
- (3) Kementeriaan atau Lembaga yang terkait

- b) Perangkat kecamatan, desa, kelurahan, nama lain, atau pendamping sosial bantuan sosial pangan.

Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat kecamatan, desa, kelurahan, nama lain, atau pendamping sosial bantuan sosial pangan dilaksanakan oleh:

- (1) Direktorat jenderal penanganan fakir miskin
- (2) Bank penyaluran
- (3) Kementeriaan daerah provinsi dan
- (4) Pemerintah daerah kabupaten kota

- c) KPM BPNT

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT dilakukan oleh:

- a. Direktorat jenderal penanganan fakir miskin
- b. Bank penyalur
- c. Kementerian atau Lembaga terkait
- d. Pemerintah daerah provinsi
- e. Pemerintah daerah kabupaten atau kota dan,
- f. Pendamping sosial bantuan sosial pangan

### **c. Penyaluran BPNT**

Proses penyaluran BPNT dilaksanakan oleh bank penyaluran dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran di bank penyaluran kepada rekening e-wallet KPM BPNT.

- 1) Pemindah bukuan dana dari rekening direktorat jenderal penanganan fakir miskin kepada bank penyalur kepada rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara ke rekening direktorat penanganan fakir miskin di bank penyalur.
- 2) Penyaluran ke dalam rekening e-wallet KPM BPNT dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan
- 3) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan mengenai belanja bantuan sosial yang

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.<sup>15</sup>

#### **d. Pembelian Barang**

Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp 110.000 setiap bulan.

- 1) BPNT tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan kartu kombo di e-warong.
- 2) Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM BPNT berupa beras dan atau telur
- 3) Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet KPM BPNT.
- 4) Pembelian barang oleh KPM BPNT dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari bank penyalur
- 5) Pemberitahuan paling sedikit berisi informasi mengenal:
  - a) Pembukaan rekening KPM BPNT
  - b) Personal *identification number* untuk penggunaan rekening
  - c) Jumlah dana BPNT
  - d) Tatacara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM BPNT dan
  - e) Informasi mengenai tabungan dalam reke
- 6) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.

---

<sup>15</sup> Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran bantuan Pangan Non Tunai*, h 8-26

- 7) KPM BPNT dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan yang diterimanya. Sisa dana yang tidak digunakan tersimpan di rekening e-wallet KPM BPNT.
- 8) KPM BPNT harus langsung mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi di e-watong.
- 9) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua e-warong dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- 10) KPM BPNT dan e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi dapat berupa struk pembelian, resi, dan tekapitulasi pembelian oleh KPM BPNT sesuai dengan lampiran II.
- 11) Bank penyaluran membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja.

Pogram ini diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya budaya kemiskinan. Berbagai intervensi kebijakan pemerintah diatas merupakan keinginan kuat dari pemerintah untuk merubah atau meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan masyarakat miskin hidup layak.

Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun dari tingkah laku. Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-sia saja.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra'ad/ 13:11.<sup>16</sup>

لَهُ... مَرَدَّفًا سُوَّاءَ بِقَوْمٍ أَرَادَ إِذَا

Terjemahannya:

*... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...*

Dalam ayat tersebut terdapat peringatan kepada semua manusia agar mengenali nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan mensyukurinya agar kenikmatan itu tidak hilang dari mereka dan Allah berikan kepada mereka, sampai mereka merubah, yakni merubah diri mereka dengan meninggalkan sikap syukur.<sup>17</sup>

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah istilah umum dari kata sejahtera yang menunjukkan suatu kondisi yang baik, kondisi yang dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.<sup>18</sup>

Kesejahteraan diartikan sebagai sebuah keadaan atau kondisi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 1 bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar

---

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra 2002), h.130

<sup>17</sup>Ismail bin Katsar, Tafsir Al-Qur'anil Azhiim, Balai Kajian Tafsir Al-qur'an Pase, h.130

<sup>18</sup>Muhammad Riski, *pengertian kesejahteraan*, [http:// id.m. Wikipedia. Definisi kesejahteraan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi_kesejahteraan). Com2016/07.(diakses pada tanggal 12 maret 2019)

dapat layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>19</sup>

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara professional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri. Kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial antara lain yaitu :**

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial antara lain yaitu :

### **a. Fungsi pencegahan**

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat tradisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

### **b. Fungsi penyembuhan**

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup>Undang –Undang Republic Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

<sup>20</sup> Syamsuddin AB, *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, Cet I(Jawa Timur: Wade, 2017), h. 3

c. Fungsi pengembangan

Kesejahteraan Sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan.

d. Fungsi penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

### 3. Indikator kesejahteraan

Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial, indikator tersebut sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yaitu : bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jasmani sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Kelima bidang tersebut sering dijadikan standar minimum untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup> Selain itu ada beberapa indikator dengan penjelasan yang lebih spesifik yang juga sering digunakan yaitu:

a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Sistem Jaminan sosial yang diperlukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Pekerjaan Sosial Dan Pembangunan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)h.256

<sup>22</sup> Bunyamin Najmi Pengertian Jaminan Sosial  
[Http://Jamsostek.Blospot.Com/2010/10/Apa Itu Jaminan Sosial](http://Jamsostek.Blospot.Com/2010/10/Apa%20Itu%20Jaminan%20Sosial)



#### b. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>23</sup>

#### c. Pendidikan

Pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan dirinya sebaik mungkin dari dalam. Cara untuk memperoleh pembelajaran dibagi dua yaitu pendidikan non formal dan formal. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang layak baik pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi. Pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan kualitas warga Negara.

#### d. Perumahan

Perumahan berasal dari kata rumah artinya sebuah tempat tinggal. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah yang berada dalam satu lokasi atau yang sering disebut kompleks. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh keluarga dalam masyarakat. Maka setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### e. Ekonomi masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, perekonomian tersebut merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk

---

<sup>23</sup><http://id.m.wikipedia.org/w. Kesehatan>

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.

f. Pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.<sup>24</sup>

### **C. Rumah Tangga Miskin**

#### **1. Pengertian rumah tangga miskin**

Keluarga miskin secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-harta (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas tidak mampu, tapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, papan, akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah

---

<sup>24</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung : Refika Aditama, 2012) H.24

dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

Namun harus ada kesadaran penuh dari masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun dari tingkah laku. Kita harus memahami bahwa Tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Ada beberapa hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melarang untuk meminta-minta, di antaranya sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah yaitu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Karini Kartono dalam bukunya “ patologi Sosial” mengatakan kemiskinan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi.<sup>25</sup>

## **2. Kriteria keluarga rumah tangga miskin.**

Kriteria keluarga miskin menurut BPS menggunakan pendekatan *basic needs* (dasar keinginan, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapiral perhari. Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah

---

<sup>25</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jilid 1, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007) h,1

yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapital perhari. Batas kecukupan pangan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain,.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki kriteria-kriteria mengenai masyarakat miskin. Ada 14 (empat belas) variabel kriteria keluarga rumah tangga miskin, sebagai berikut:

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minimum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/suungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan hanya satu atau dua kali dalam sehari.

- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000,- (Enam ratus ribu) per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor kredit/ non- kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal dlainnya.<sup>26</sup>

### 3. Penyebab kemiskinan

Menurut penganut fungsionalisme, kemiskinan sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (sub sistem) yang ada dalam masyarakat. Konsep disfungsi ini sangat berguna dalam mengembangkan pendekatan fungsional terhadap masalah sosial.

Ada juga yang mengatakan bahwa penyebab kemiskinan dilihat dari bentuk kemiskinannya, terdiri atas kemiskinan natural, dan kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural.

- a. Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin.

---

<sup>26</sup> Kementerian Sosial Republic Indonesia, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011* (Jakarta:Kementerian Sosial RI, 2011),h 24-25

- b. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.<sup>27</sup>

#### 4. Sumber-Sumber Penerima Bantuan

Pendapatan secara umum seringkali berhubungan dengan sejumlah uang yang diterima seseorang sebagai hasil atas balas jasa yang dilakukan, dikerjakan atau diterima seseorang sebagai hasil atas balas jasa yang dilakukan, dikerjakan atau diinvestasikan, penerima atau income yang dimiliki seseorang pasti akan berbeda dengan penghasilan orang lain. Pendapatan seseorang bisa berasal dari berbagai sumber tidak hanya tidak hanya bersumber dari lakukan balas jasa saja namun juga dapat diperoleh dari beberapa alternatif, misalnya, pendapatan investasi dan portofolio, bagi sebagian orang pendapat yang mereka terima juga dapat bersumber dari penerima atas investasi yang mereka lakukan. Sesuai dengan namanya, maka pendapatan investasi merupakan penghasilan yang berasal dari hasil investasi, contohnya investasi reksadana, saham, obligasi, dan lainnya.

Sumber penerimaan lain yang menjadi alternatif atas penerimaan yang diperoleh masyarakat adalah penerimaan atas subsidi yang dikeluarkan oleh

---

<sup>27</sup> Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. (Cet 1 : Bandung 2016), h.256-257.

pemerintah, namun pendapatan dari subsidi ini memang di peruntukan bagi masyarakat yang dianggap layak dalam menerima subsidi, hal tersebut dikarenakan manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sehingga subsidi dianggap sebagai salah satu cara alternatif sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Adapun beberapa jenis subsidi yang diberikan pemerintah yang kemudian menjadi salah satu sumber penerima alternatif masyarakat seperti subsidi tidak langsung yaitu subsidi kesehatan, bantuan dana pendidikan, subsidi BBM, subsidi beras miski, yang memang tidak dikeluarkan dalam bentuk nominal rupiah namun subsidi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, adapun juga subsidi yang langsung seperti subsidi bantuan langsung tunai, ataupun subsidi yang diperuntukan bagi keluarga sangat miskin seperti Program keluarga Harapan yang dimana subsidi yang diterima ialah subsidi berupa nominal mata uang.

##### 5. Pola Konsumsi Dan Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga

Konsumsi sering di artikan sebagai tindakan pemenuhan makanan dan minuman saja, namun sejatinya tindakan konsumsi lebih luas dari pengertian tersebut, konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang dan jasa akhirnya yang siap digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun konsumstahani menurut mankiw, bahwa konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi. Barang dapat dipilah menjadi barang tidak tahan lama (*non durable goods*) yaitu barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Dan barang tahan lama (*durable good*) yaitu

barang yang memiliki usia panjang seperti alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor. Sementara itu jasa (service) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter. Adapun pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi terbagi kedalam dua kategori yaitu konsumsi makanan dan non makanan .

Pola konsumsi dapat diartikan sebagai jenis dan besaran kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, yang dipenuhi dari pendapatannya, pola konsumsi menggambarkan bagaimana seseorang memutuskan beberapa jumlah kombinasi barang atau jasa yang akan dibeli dalam berbagai kondisi yang dihadapi (Schiffman and kamuk,2004). Pola konsumsi tiap orang berbeda-beda, tetapi secara umum dalam berkonsumsi orang akan mendahulukan kebutuhan pokok, baru kemudian memenuhi kebutuhan lainnya, perbedaan pola konsumsi tiap orang tiap hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Tingkat pendidikan atau pengetahuan
- b. Kondisi tempat tinggal iklim
- c. Jenis pekerjaan
- d. Tingkat peradaban bangsa
- e. Kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat
- f. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa
- g. Selera yang sedang berkembang di masyarakat.



Pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga umumnya berbeda antar kelompok pendapatan, antar etnis atau suku dan antar waktu. Struktur pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga dengan pengeluaran pangan tinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah relatif dibanding rumah tangga (Rachman, HPS, 2001). Pengeluaran juga disebut sebagai pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga tergantung pada pendapat yang diterima, dimana diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi dan juga tingkat pengeluaran rumah tangga atau individu (Talumingan 1996), juga menyatakan bahwa alokasi untuk kebutuhan konsumsi adalah sejumlah dana atau pendapatan yang digunakan untuk konsumsi baik konsumsi pangan maupun non pangan seperti pendidikan dan kesehatan.

#### **D. Teori Perubahan Sosial**

Kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber dan beberapa ilmuwan sosiologi dunia lainnya.

##### **1. Pengertian Perubahan sosial menurut para ahli**

###### **a. Auguste Comte**

Menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahap-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan Evolusi intelektual. Tahap-tahap pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap teologis Primitif; tahap metafisik transisional dan terakhir tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran manusia

tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial.

b. Karl mars

pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja.

c. Emile Durkheim

Melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari factor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organik.

d. Menurut *Soerjono Soekanto*, (2004)

Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, didalamnya termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

## **2. Bentuk dan Aspek-aspek perubahan sosial**

a. Bentuk-bentuk perubahan sosial

Dilihat dari segi bentuk terjadinya, maka perlu bahan sosial dapat dibahas dalam tiga dimensi atau bentuk yaitu : perubahan sosial menurut kecepatan prosesnya, ada yang berlangsung lambat (evolusi) dan ada yang cepat (revolusi). Perubahan

sosial menurut skala atau besarnya pengaruhnya luas dan dalam,serta ada pengaruhnya relative kecil terhadap kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, adalah perubahan sosial menurut proses terjadinya, yaitu ada yang direncanakan (planned) atau dikehendaki, serta ada yang tidak direncanakan (unplanned). Menurut kecepatan prosesnya , peubahan sosial dapat terjadi setelah melalui peroses perkembangan masyarakat yang panjang dan lama, yang disebut revolusi. Adapun menurut skala pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan,namun sebaliknya ada pula perubahan sosial berskala kecil dalam arti pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan relatif kecil dan terbatas.

#### b. Aspek-aspek perubahan sosial

Aspek-aspek perubahan sosial dapat dibahas dalam dua dimensi. Pertama, aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek material, aspek norma-norma dan aspek nilai-nilai. Kedua, aspek yang dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, yang dalam kegiatan belajar ini dikemukakan bidang kehidupan ekonomi, bidang kehidupan keluarga, dan lembaga-lembaga masyarakat. Aspek kebudayaan material adalah aspek –aspek yang sifatnya material dan dapat diraba atau dilihat secara nyata, seperti pakaian,alat-alat kerja, dan sebagainya. Karena sifatnya materil,maka aspek kebudayaan ini relative cepat berubah.

Adapun aspek norma (*norms*), menyangkut kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara semua warga masyarakat. Aspek ini relative lebih lambat berubah dibandingkan dengan aspek budaya dan

material. aspek lain adalah nilai-nilai budaya (Values), yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan atau falsafah hidup masyarakat.<sup>28</sup>

### **3. Faktor Bersifat Internal Dan Eksternal Perubahan Sosial**

#### **a. Faktor-faktor internal perubahan sosial**

faktor internal mempengaruhi perubahan sosial adalah menyangkut faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi atau perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang mendorong perubahan sosial. Faktor-faktor ini terutama mencakup faktor demografis (kependudukan), faktor penemuan-penemuan baru, serta adanya konflik-konflik internal dalam masyarakat. Faktor-faktor demografis adalah semua perkembangan yang berkaitan dengan aspek demografis atau kependudukan yang mencakup jumlah, kepadatan, dan mobilitas penduduk. Sedangkan penemuan baru adalah adanya penemuan dikalangan atau oleh warga masyarakat, berupa suatu alat atau cara selanjutnya diterima penggunaannya secara luas oleh masyarakat. Sementara itu, faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul dikalangan warga atau kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok.

#### **b. Faktor Eksternal perubahan sosial**

Berbagai faktor eksternal yang mendorong perubahan sosial meliputi kondisi atau perkembangan yang terjadi diluar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

---

<sup>28</sup> Rasyid M Abd., *Perubahan Sosial dan Strategi Komunikasi*. (Cet 1 : Maret 2018), h.13-22

perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor eksternal yang terpenting diantaranya dalam pengaruh lingkungan alam fisik, pengaruh unsur kebudayaan maupun akutalisasi, fektor eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau bangsa oleh bangs lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya perubahan sosial terutama dikalangan masyarakat atau bangsa yang kalah perang.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena.<sup>29</sup> Dalam rangka mengkaji perilaku suatu individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri tapi memiliki keterkaitan.

Berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektifitas maupun kenyataan subjektifitas. Penelitian ini difokuskan pada Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu kecamatan Amali Kabupaten Bone.

Berdasarkan konteks yang demikian, maka penulis memilih metode penelitian kualitatif, metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subyek dan objek penelitian yang meliputi masyarakat dan pemerintah, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitasi sosial dan persepsi sasaran penelitian.

---

<sup>29</sup>Suwardi Endswarsa, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu kecamatan Amali Kabupaten Bone. Maka penelitian berlokasi di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosiologi bahwa sosiologi diartikan sebagai ilmu secara khusus mempelajari, kehidupan masyarakat<sup>30</sup>.

Pada hakikatnya sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni (*pure science*) yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri namun sosiologi juga menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan problematika sosial.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang di kumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek, dan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Objek yang dimaksud adalah informan yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Dalam hal ini tentu yang di maksud adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Lurah Mampotu, Tokoh Masyarakat Kelurahan Mampotu, Pendamping Keluarga Harapan (PKH), TKSK (Tenaga Kesejahteraan

---

<sup>30</sup> Haris Sumdiria, *Sosiologi Komunikasi Massa* (Bandung Simbiosis Rekatamu Media, 2014), h.29

Sosial Kecamatan), dan penerima bantuan /Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jadi keseluruhan sejumlah informan ada 11, yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan cukup memberikan kontribusi pada penelitian.

Adapun alasan penulis memilih masyarakat Kelurahan Mampotu, Lurah Mampotu, Tokoh Masyarakat Mampotu, Pendamping Keluarga Harapan (PKH), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan Keluarga Penerima Bantuan karena mereka adalah yang dianggap banyak mengetahui tentang apa yang ingin diteliti penulis.

## **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari studi keputusan baik berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara yang dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan objek yang akan diteliti.



Dengan melakukan observasi maka dapat diperoleh gambaran keadaan dan kondisi yang terkait dengan apa yang akan diteliti, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka yang diteliti dengan menggunakan “pedoman wawancara”. Wawancara dalam penelitian kualitatif lebih bersifat mendalam dan seringkali tidak terstruktur. Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontuksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkem. Wawancara merupakan alat *re-checking* ataupun pembuktiaan terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan documenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi.<sup>31</sup>

#### E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian.

---

<sup>31</sup>Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metodi Penelitian Sosial* (Cet I; Jawa Timur: Wade Group National Publishing 2017), h.103-104.

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Observasi**

Observasi yang dimaksud dalam hal ini adalah alat yang digunakan oleh peneliti pada saat melakukan observasi, yaitu pedoman observasi yang terkait dengan bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah alat yang digunakan pada saat melakukan wawancara oleh peneliti terhadap informan. Alat yang dibutuhkan yaitu pulpen, buku catatan, alat perekam (handphone) dan pedoman wawancara yang berkaitan dengan bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada rumah tangga miskin di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu alat yang digunakan pada saat mengambil data atau dokumen yang sudah ada terkait dengan bagaimana Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada rumah tangga miskin di kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Alat yang dimaksud yaitu kamera, flash disk, CD ROM dan sebagainya.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi obyek peneliti, namun juga merupakan satu

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari:

1. Reduksi data, dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan-pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuat mana yang merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang berkembang.
2. Penyajian data, yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada.

## **BAB IV**

### **OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE.**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **1. Sejarah, Letak dan Batas Wilayah Kabupaten Bone**

Penjelasan objek lokasi penelitian pada penelitian ini dibahas lebih awal untuk mengetahui objek terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih jauh permasalahan yang di angkat dalam tulisan ini atau dalam penelitian ini. Penulisan kemudian memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, karena sangat memberikan andil bagi peneliti untuk mengumpulkan data, di sisi lain pentingnya mengetahui lokasi penelitian agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh, dan karakteristik penduduknya sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah etonomdi Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Berdasarkan data kabupaten Bone dalam angka tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2015 adalah 863.654 jiwa, terdiri atas 422.818 laki-laki dan 441.236 perempuan.

Bone merupakan kabupaten terluas yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 162 jiwa per km<sup>2</sup>. Kabupaten Bone merupakan wilayah yang besar dengan terbagi atas 27 kecamatan dan 372 de/kelurahan. Terdiri atas kecamatan Ajangale, Amali, Awangpone, Barebbo, Bengo, Bontocani, Cenrana, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Libureng, Lamuru, Lappa Riaja, Mare, Palakka, Tellusiattingge, Tonra dan kecamatan Ulaweng. Kabupaten Bone di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo, Soppeng, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Gowa, sebelah Barat Kabupaten Maros, Pangkep, Barru dan sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.<sup>32</sup>

Kantor Kelurahan Mampotu kecamatan Amali berada di Taretta Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Kelurahan Mampotu merupakan satu-satunya Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Amali dan merupakan ibu Kota Kecamatan. Taretta sebagai ibu kota Kelurahan dengan ketinggian tempat 130 mdpl, memiliki luas wilayah 9.20 km<sup>2</sup> dari 119.13 km<sup>2</sup> luas total Kecamatan Amali atau 7.72% dengan jumlah penduduk laki-laki 842 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 998 jiwa, total keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Mampotu adalah 1.840 jiwa. Secara administratif, wilayah Kelurahan Mampotu memiliki 6 lingkungan diantaranya adalah lingkungan Ta'cipong, Lewa-Lewa, Kampung Baru, Lompoe, Taccorong 1 dan Lingkungan Taccorong 2, serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ta'cipong, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waempubbu, sebelah

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone 2018

Selatan berbatasan dengan Desa Ulaweng Riaja, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waemputtange.<sup>33</sup>

**Tabel 1.1Jumlah Penduduk Kecamatan Amali**

NO	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Mampotu	842	998	1.840
2	Waempputtange	570	652	1.222
3	Ajanglaleng	549	647	1.196
4	Bila	670	665	1.335
5	Laponrong	641	750	1.391
6	Liliriattang	779	851	1.630
7	Amaliriattang	821	873	1.694
8	Mattaropurae	653	763	1.416
9	Tacipong	775	671	1.446
10	Tassipi	712	643	1.355
11	Ulaweng Riaja	561	623	1.184
12	Tocinnong	534	639	1.173
13	Waempubu	682	653	1.335
14	Welullang	711	782	1.493
15	Benteng Tellue	649	736	1.385
<b>Jumlah</b>		<b>10.149</b>	<b>10.946</b>	<b>21.095</b>

*sumber Data:Kantor Kecamatan Amali Tahun2019*

## 2. Mata pencaharian

Masyarakat yang ada di kabupaten Bone juga memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam, akan tetapi ada dua mata pencaharian yang banyak diminati atau dikerjakan oleh masyarakat setempat, yaitu : Petani dan Pengusaha Walet, karena memang keadaan geografisnya, sebab di wilayah tersebut dalam wilayah pegunungan.

Sehingga masyarakat Bone membuat pemukiman atau tempat tinggal tidak jauh dari sumber mata pencahariannya, misalnya petani tidak akan jauh bertempat tinggal dari sawah dan ladangnya, namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang, petani, tukang, dan pegawai negeri. Sudah jelas bahwa masyarakat

<sup>33</sup> Data Kelurahan Mampotu Kecamatan AMALI 2019

Bone membuat suatu perkempungan dengan perhitungan dan pertimbangan menurut kepentingan hidup.

Serta mempunyai hasil bumi berupa pangan, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah yang diperdagangkan. Tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu, kacang-kacangan. Sayuran berupa kol, tomat, cabe, terong, timun, dan kacang panjang. Buah-buahan berupa mangga, jeruk, nangka, rambutan, durian, pisang, langsung, kelapa. Sedangkan yang diperdagangkan berupa kopi, coklat, dan jambu mente. Itulah beberapa macam mata pencaharian yang ada di kabupaten Bone.

### 3. Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan Terakhir	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	SD	3	10
2	SMP	12	40
3	SMA	7	23.3
4	Diploma/ Sarjana	8	26.7
<b>Jumlah</b>		30	100

*sumber Data: Kantor Kelurahan Mampotu Tahun 2019*



Tabel 1.3 Data penerima bantuan pangan non tunai Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.

No	NAMA	NIK	DUSUN	KAB.	KEC.	KEL.
1	AMANG	7308244906780001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
2	ANI SURIANI	7308245212850001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
3	ASIA HASDANIATI	7308244408750001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
4	ASIAH	7308244409670001	LEWA LEWA	BONE	AMALI	MAMPOTU
5	ASMA WATI	7308245704860001	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
6	ASNIDAR AMIR	7308240107630233	KAMP BARU	BONE	AMALI	MAMPOTU
7	BAYANA	7308244107650001	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
8	CENDENG	7308244107550116	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
9	CINNING	7308244107560147	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
10	DAHLIA	7308242707780002	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
11	DANNGA	7308240107490113	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
12	DASI	7308244107520012	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
13	DAWA	7308244107540149	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
14	DAWIAH	7308244507710001	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
15	DAYA	7308244107610002	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
16	DIRA	7308244411570001	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
17	DUNI	7308244107550112	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
18	ERNAWATI	7308244307850003	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
19	ETTING	7308247112730007	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
20	FATMA WATI	7308244107600017	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
21	HADIRA	7308246907740001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
22	HAJRAH	7308244107750168	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
23	HAKING	7308240107520014	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
24	HASNA	7308244107530001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
25	HASNA	7308245508750001	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
26	HASNA	7308244101680001	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
27	HASNAH	7308244510830001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
28	HASNAWATI	7308244106800002	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
29	HASNIDAR	7308244601890001	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
30	HAYATI	7308244107730200	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
31	HAYATI	7308244107720008	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
32	JAHAHIA	7308244107550010	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
33	JANNA	7308244703750001	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU

34	JAWARIA	7308244107320005	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
35	JUMAENI	7308244406840001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
36	JUNEDA	7308244707800003	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
37	KARAMATANG	7308244107770005	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
38	KASMA	7308247112840008	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
39	LILI SURIANI	7308245212810001	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
40	LINDA	7308244107830003	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
41	MARE	7308244107570081	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
42	MARI	7308247112660007	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
43	MASITA	7308244107490136	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
44	MATAHARI	7308244107690009	KAMP. BARU	BONE	AMALI	MAMPOTU
45	MATTARIMA	7308240107430001	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
46	MAYA	7308246011780002	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
47	MELLA	0	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
48	MUNI	7308240107480006	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
49	NAIDA	7308244107600016	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
50	NAJE	7308244107610007	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
51	NANNE	7308244107600015	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
52	NAWIAH	7308244107520017	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
53	NIAR	7308244107790004	TACCORONG 1	BONE	AMALI	MAMPOTU
54	NINGKA	7308240107620008	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
55	NIRWANA	7308246111910001	LEWA LEWA	BONE	AMALI	MAMPOTU
56	NISMA	7308244205820002	LEWA-LEWA	BONE	AMALI	MAMPOTU
57	NORMAH	7308244107640007	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
58	NUPE	7308244107570097	TACCORONG 2	BONE	AMALI	MAMPOTU
59	NURHAYATI	7308244107700188	TANETE	BONE	AMALI	MAMPOTU
60	NUR HASANA	7308240504770001	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU
61	NURBAYA	7308244107660009	KAMP BARU	BONE	AMALI	MAMPOTU
62	RITA	7308244601730001	TACIPONG	BONE	AMALI	MAMPOTU

*sumber Data: Kantor Kelurahan Mampotu Tahun 2019*

***B. Bentuk Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  
Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kelurahan Mampotu  
Kecamatan Amali Kabupaten Bone.***

Program Bantuan Pangan diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi, ketetapan sasaran penyaluran bantuan

sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan Nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>34</sup>

Optimalisasi merupakan proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal, Optimalisasi pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan tetap berdasar pada pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dapat dilihat dari jumlah penting, sebagi berikut :

**a. Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dalam aspek perencanaan.**

Aspek perencanaan merupakan tahap awal kegiatan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai melalui rapat terbatas tentang keuangan inklusif pada tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai yang menggunakan perbankkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Menurut Muhammad Kadir ( Pendamping Keluarga Harapan di Kecamatan Amali Kelurahan Mampotu ) mengatakan bahwa :

“ Perencanaan BPNT terdiri dari koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah ( Kabupaten, Kecamatan,

---

<sup>34</sup> Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai* , Jakarta, 2018, h 4.

dan Kelurahan), tujuan koordinasi itu untuk memastikan mekanisme pelaksanaan di lapangan dan diharapkan mencapai 6 aspek yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi”<sup>35</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat meliputi pihak Kementerian Sosial, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan sejumlah pihak lainnya. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting sebagai instrument penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan data-data akurat subjek bantuan tersebut agar tujuan adanya bantuan pangan non tunai bisa tercapai.

Aspek perencanaan Bantuan Pangan Non Tunai sangat menentukan kelanjutan pelaksanaan bantuan BPNT secara berjenjang yang diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Hal tersebut disarankan dilakukan oleh pihak pelaksana program bantuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

#### 1) Strategi program

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mampotu sudah berlangsung sejak awal tahun 2018, dimana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin khusus di Kabupaten Bone, yang diberikan oleh pemerintah.

---

<sup>35</sup> Muhammad Kadir ( Pendamping PKH Kelurahan Mampotu), *Wawancara* di kediaman pendamping PKH Kelurahan Mampotu pada tanggal 19 Januari 2020.

Strategi adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menjalankan wewenang dan mencapai tujuan dari program BPNT. Usaha tersebut membutuhkan kerjasama antara Dinas Sosial Bone. Pemerintah kecamatan/kelurahan yang terkait dan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Program BPNT ini dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat dan sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin.

Menurut Yuliana (Pendamping PKH ).

“Bahwa salah satu strategi yang dilakukan petugas Pendamping BPNT adalah melakukan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dan calon keluarga penerima manfaat, kami juga melakukan berupa pendataan kepada tiap-tiap warga, untuk warga yang ingin terdaftar sebagai penerima manfaat seperti halnya warga menyerahkan berkas seperti Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.”<sup>36</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi ini sangat penting dilakukan, agar mengetahui dan memahami mengenai tujuan program BPNT. Untuk selanjutnya ketika proses sosialisasi dan pendataan terselesaikan, kami juga melakukan survey secara fisik ke rumah-rumah warga untuk mendokumentasikan foto rumah hadap depan, belakang, samping, dalam dan luar. Dari hasil survey tersebut, data akan kami kirim ke pusat yakni kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia.

---

<sup>36</sup>Yuliana ( Pendamping PKH Kelurahan Mampotu), *Wawancara* di kediaman pendamping PKH Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 Januari 2020.

## 2) Berdasarkan Kategorisasi

Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone merupakan salah satu yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT diselenggarakan dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat merupakan program terbaru dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat dari pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2007. Sebelum dikenal dengan nama program BPNT dahulu program ini sering dikenal masyarakat sebagai Program Rasking (Beras Miskin). Namun berganti nama menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Konsep yang lebih modern.

### **b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Aspek Pelaksanaan**

Program Bantuan Pangan Non Tunai telah terealisasi dengan baik, Namun, sejauh ini pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Dengan demikian untuk mencapai kesuksesan suatu program BPNT terkhususnya di Kelurahan Mampotu harus memenuhi 6T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi.

#### 1. Ketepatan sasaran

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah. Sasaran BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari data terpadu program

penanganan fakir miskin, yang selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data tersebut di kelolah oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penanganan fakir miskin (Pokja Data) yang dibentuk dari SK Mensos. Jumlah KPM BPNT di setiap provinsi dan Pagu penerima BPNT Kabupaten di lingkup kabupaten. Pagu KPM menjadi titik fokus ketetapan dari sasaran BPNT dan harus ada tindak pembenahan.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Amirdin,SP,t.M.Si ( Lurah Mampotu)

“Bagi kami selaku pemerintah selalu dan perlu memberikan perhatian dan bekerja sama dengan baik dengan para pendamping sehingga pelaksanaan bantuan sesuai dengan seharusnya dan tidak ada pihak yang dirugikan ”<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara kepada bapak Lurah Mampotu bahwa peran pemerintah menjadi sentral pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan perlunya kerjasama yang baik dengan para pendamping supaya pelaksanaan BPNT tersebut berjalan sesuai dengan Prosedur ,tepat sasaran dan sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwa program BPNT telah memberikan kemudahan bagi sebagian orang. Penekanan bagi program BPNT, mengupdate data baru bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar kiranya tepat sasaran dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Wawancara dengan ibu Junaida dan ibu Beda (Masyarakat )

Bahwa masyarakat yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian besar adalah keluarga yang keadaan ekonominya sudah dikatakan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian, dengan kondisi rumah yang masih layak dihuni. Ada juga ditemukan masyarakat yang layak menerima

---

<sup>37</sup>Bapak Amirdin,SP,t.M.Si ( Lurah Mampotu), *Wawancara Di Kediaman Lurah Mampotu pada tanggal 29 Januari 2020.*

program BPNT atau kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan BPNT.<sup>38</sup> Menurut Ibu Beda data yang digunakan masih data lama sehingga orang yang dulu mendapatkan bantuan dan sekarang sudah mampu dan tidak termasuk lagi golongan penerima manfaat tetapi dia tetap mendapatkan Bantuan BPNT, disebabkan karena tidak dilakukannya pembaharuan data dan kurangnya juga kesadaran dari pihak tersebut.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program BPNT di Kelurahan Mampotu belum bisa dikatakan tepat sasaran, karena berdasarkan keadaan KPM disana masih banyak ditemukan keluarga yang tergolong keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan BPNT dikarenakan masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT

## 2. Ketepatan Waktu

Pembagian beras dan telur yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidaksihan jadwal penyaluran di benarkan oleh ibu Baya dan ibu Matahari selaku Penerima Bantuan.

---

<sup>38</sup>Ibu Junaida (Masyarakat kelurahan Mampotu), *Wawancara Di Kediaman ibu junaida Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 24 Januari 2020.*

<sup>39</sup>Ibu Beda (masyarakat), *Wawancara Di Kediaman ibu Beda Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 28 Januari 2020.*



“Berdasarkan wawancara dengan ibu Bayana selaku penerima BPNT di Kelurahan Mampotu, beliau menyampaikan bahwa prosedur penyaluran Program BPNT sudah sesuai tapi ketepatan waktu belum terlalu tepat. Beliau juga menyampaikan bahwa bantuan yang di dapat seperti beras dan telur hanya bisa bertahan 15 hari.<sup>40</sup> Ibu Rita pun menyampaikan demikian pula bahwa program BPNT memang harus dibagikan sebulan sekali, tetapi pernah dari bulan maret 2019 sampai mei 2019 tidak keluar setiap bulan tetapi pada bulan Mei dibagikan menjadi 3 kali lipat karena dari Maret 2019 sampai Mei 2019 tidak keluar.”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program BPNT di Kelurahan Mampotu belum tepat waktu karena kenyataannya masih terkadang penyalurannya tidak sebulan sekali seperti kejadian bulan Maret sampai bulan Mei yang tidak keluar dan akhirnya sekalipun keluar dilipatkan.

Hasil wawancara dengan bapak Haris selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, bahwa keterlambatan itu terjadi karena saldo dari pusat belum masuk kedalam rekening KPM, kami sebagai petugas hanya bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk menyakan kepada pihak bank Himbara seperti Kantor BNI Wilayah, karena untuk permasalahan saldo yang bertanggungjawab adalah pihak bank Himbara nya.

### 3. Tepat Kualitas

Sebelum bantuan sosial disalurkan, dilakukan pengecekan beras terlebih dahulu terkait kualitas kelayakan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan setempat. Setelah pengecekan sudah dilakukan dan dinyatakan sudah memenuhi standar medium yang akan disalurkan dalam kondisi layak konsumsi serta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

---

<sup>40</sup>Ibu Bayana (Penerima BPNT), *Wawancara* Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>41</sup>Ibu Rita(Penerima BPNT), *Wawancara* Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 21 Januari 2020.

Menurut wawancara pak Haris (Kepala TKSK)

“Bahwa pengecekan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang harus betul-betul teliti dilakukan sebelum dilakukan penyaluran ketiap-tiap Agen hingga KPM.”<sup>42</sup>

Hal tersebut agar bantuan yang diberikan ke keluarga penerima manfaat untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari itu, betul-betul terjaga kualitasnya serta layak konsumsi oleh semua KPM.

Menurut wawancara ibu Nurhayati (Penerima BPNT)

Kita merasa senang dengan kualitas bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kita terima sudah sangat layak untuk dikonsumsi dan keluarga pun tidak pernah complain mengenai kualitas pangannya.<sup>43</sup>

#### 4. Tepat jumlah

Pada tingkat pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali, sejauh ini dari aspek tepat harga, tepat kualitas sudah berjalan dengan baik. Namun, BPNT masih memiliki kelemahan dari sisi jumlah bantuan yang dirasakan oleh sejumlah KPM yang mempunyai anggota keluarga yang banyak belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sepenuhnya dalam sebulan penuh.

Wawancara dengan ibu Bayana pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 16.00 WITA, selaku penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mampotu, beliau menyampaikan bahwa saya keluarga yang tergolong kurang mampu, adanya tanggungan anak yang banyak sehingga jumlah bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan

---

<sup>42</sup>Bapak Haris (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Amali), Wawancara di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Pada Tanggal 20 Februari 2020.

<sup>43</sup>Ibu Nurhayati (KPM Kelurahan Mampotu), Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 12 Januari 2020.

pangan sepenuhnya dalam sebulan penuh, biasanya baru 15 hari bantuan yang diberikan sudah habis<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan dengan ibu Baya hal ini didasari dengan keberlangsungan hidup sehari-hari merasa belum cukup memenuhi kebutuhan pangan yang sepenuhnya dalam sebulan penuh dengan tanggungan keluarga yang cukup banyak.

#### 5. Tepat harga

Harga Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Mampotu seperti beras dan telur yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak pungut biaya.

Wawancara dengan ibu Matahari (KPM)

Bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan seperti beras 5 kg dan 3 rak telur itu diberikan secara gratis tanpa pungut biaya kita cuma membawa kartu KKS.<sup>45</sup>

#### 6. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Sistem yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yakni menggunakan sistem kartu kombo atau sering disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat yang sudah berhasil melalui tahap verifikasi data maupun validasi data.

---

<sup>44</sup>Ibu Bayana (Penerima BPNT), *Wawancara* Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>45</sup>Ibu Matahari (Penerima BPNT), *Wawancara* Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 4 Januari 2020.

Wawancara dengan ibu Rita (Keluarga Penerima Bantuan)

Mengatakan bahwa Dengan adanya kartu KKS ini sangat memudahkan kita selaku KPM untuk mengambil bantuan tersebut ,kita tinggal menunggu saldo masuk di kartu baru kita cairakan dananya melalui agen e-warong.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu bahwa dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para penerima maaaaaanfaat bantuan tersebut akan mendapatkan saldo rekening sebesar Rp. 110.000/ perbulan. Saldo tersebut akan dicairkan kepada agent brilink untuk menukarkan saldo tersebut dengan kebutuhan pokok pangan seperti beras dan telur.

Berdasarkan indikatot 6T diatas bahwasanya program BPNT di Kelurahan Mampotu ini belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidak tepat sasaran yang belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Ketidak tepat sasran dalam hal ini menunjukkan bahwa data yang diambil dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan program BPNT dari pemerintah, dan ada juga keluarga yang terbilang mampu masih mendapatkan program BPNT.

Sebagian besar penerima program BPNT di Kelurahan Mampotu ini keluarga yang keadaan perekonomiannya cukup baik dalam hal ini sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian. Walaupun para petani tidak dapat merasakan hasil dari apa yang mereka tanam setiap harinya namun mereka masih dapat memenuhi segala kebutuhan didalam keluarga dengan mengandalkan hasil pertanian mereka. Dan masih banyak masyarakat miskin yg belum merasakan manfaat adanya program BPNT ini. Hal ini dikarenakan program BPNT masih

---

<sup>46</sup>Ibu Rita(Penerima BPNT), *Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu* pada tanggal 21 Januari 2020.

menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu.

Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat program BPNT seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif tidak semata-mata memandang anggota keluarga lurah saja, yang keadaanya sudah mampu namun ingin mendapatkan program BPNT. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat program BPNT ini.

Selain kurangnya tepat sasaran dalam pemberian program BPNT, adanya ketidak tepatan waktu dalam pembagian program BPNT seharusnya rutin sebulan sekali ini malah tidak menentu kapan keluarnya. Seperti kejadian yang terjadi pada bulan Maret sampai Mei dimana program tersebut keluar tiga bulan sekali.

Meskipun demikian indikator ketepatan kualitas, harga sudah terlaksana dengan baik. Seluruh keluarga yang menerima program BPNT di Kelurahan Mampotu mengatakan harganya gratis dan kualitasnya bagus untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil lapangan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai program Bantuan Pangan Non Tunai dengan hasil yang optimal di Kelurahan Mampotu harus memenuhi 6 indikator yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas Dan Tepat Administrasi sehingga program tersebut akan berjalan dengan optimal.

***C. Penunjang Dan Penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone***

**1. Faktor Penunjang**

Faktor penunjang atau pendukung Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu:

1. Tenaga pendamping atau fasilitator yang berintegritas dan profesional

Tenaga pendamping sangat berperan penting dalam kelancaran program-program yang berkaitan pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya untuk program BPNT. Dimana para pendamping ini merupakan seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam penanganan masalah sosial atau seseorang yang bekerja dibidang kesejahteraan sosial.

Menurut Wawancara dengan ibu Rita

“Tenaga pendamping itu harus memang betul-betul profesional dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai, karena sangat menunjang keberhasilan suatu program sehingga tepat sasaran”<sup>47</sup>

Hal tersebut tenaga pendamping harus militan. Artinya bersemangat tinggi penuh gairah mendorong perubahan perilaku dan kemandirian pada KPM. Jangan hanya menjadi pelaksana program saja, kalian harus profesional dan punya

---

<sup>47</sup>Ibu Rita(Penerima BPNT), Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 21 Januari 2020.

target, dan harus memiliki perencanaan kerja yang baik dan memiliki inovasi untuk mencapai kemandirian KPM supaya program tersebut tepat sasaran.

## 2. Dukungan pemerintah Kabupaten terkait adanya program BPNT.

Hal itu tentu tidak lepas dari dukungan yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam upaya memperjuangkan penyaluran bansos melalui skema program BPNT dan penyaluran bantuan sosial kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran bansos sehingga lebih tepat sasaran serta mendorong tercapainya keuangan inklusif di masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.

Menurut Bapak Amirdin, SP., M.Si ( Lurah Mampotu)

“Program ini terlaksana di Kelurahan mampotu karena tidak lepas dari adanya dukungan dari pemerintah kabupaten. Kerjasama yang dilakukan dengan para pendamping BPNT dan pemerintah kelurahan sehingga pelaksanaan bantuan sesuai dengan seharusnya dan tidak ada pihak yang dirugikan”<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwa peran pemerintah kabupaten juga menjadi sentral pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), keberhasilan pelaksanaan BPNT tersebut dapat diukur karena adanya kerjasama yang dilakukan sehingga berjalan sesuai dengan Prosedur , tepat sasaran dan sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>48</sup>Bapak Amirdin, SP., M.Si ( Lurah Mampotu), *Wawancara* Di Kediaman Lurah Mampotu pada tanggal 29 Januari 2020.

### 3. Ketersediaan data penduduk miskin.

Salah satu faktor pendorong berjalanya suatu program itu adalah adanya ketersediaan data penduduk miskin. Se jauh ini, angka kemiskinan Indonesia tersedia hingga tingkat kabupaten/ kota yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.

“Wawancara dengan Bapak Haris pada tanggal 20 februari 2020 pukul 14.50, selaku Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Amali, dengan adanya data yang sudah ada, inilah yang akan kami survey kembali dan akan kami prioritaskan untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Adanya ketersediaan data penduduk miskin di Kelurahan Mampotu sehingga memudahkan untuk menentukan target secara tepat untuk program bantuan sosial. jika pemerintah daerah, misalnya, ingin melaksanakan sebuah program terkait kemiskinan.

## 2. Faktor Penghambat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hambatan adalah halangan atau rintangan hambatan memiliki arti yang sangat dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada satu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu atau tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari baik

---

<sup>49</sup>Bapak Haris (Anggota TKSK Kecamatan Amali), *Wawancara Di Kediaman Pak Haris Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 Februari 2020.*



pada diri manusia itu sendiri maupun ataupun dari luar manusia.<sup>50</sup> Adapun yang menjadifaktor penghambat

1. Adanya Ketidak Konsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulanya.

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank penyalur adalah salah satu instrument penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial kerekening Kementerian Sosial di Bank Penyaluran ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan dilakukan paling lama 30 hari setiap bulannya sejak dana transfer dari kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur.<sup>51</sup>

Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidak konsistenan jadwal penyalura di benarkan oleh ibu nurhayati (pedagang beras), ibu muni (ibu rumah tangga),ibu baya (ibu rumah tangga).

Ibu Nurhayati (pedagang beras), mengatakan biasanya penyaluran lewat dari jadwal bulan lalu kita tidak terima bantuan tersebut.<sup>52</sup> Ibu muni (ibu rumah tangga) mengatakan bantuan pangan tidak tepat sasaran dan membuat kita selalu menunggu.<sup>53</sup> Ibu Baya (ibu rumah tangga) bahwa

---

<sup>50</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994

<sup>51</sup> Tim Pengendali Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*.(Jakarta 2017) hal 113.

<sup>52</sup> Ibu Nurhayati (KPM Kelurahan Mampotu), *Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu* pada tanggal 12 Januari 2020.

<sup>53</sup> Ibu Muni (KPM Kelurahan Mampotu), *Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu* pada tanggal 23 februari 2020.

pelaksanaan sudah bagus namun terkadang tidak sesuai dengan jadwal saat penyaluran<sup>54</sup>.

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa jadwal untuk menerima bantuan sering tidak menentu, kadang tidak sesuai dengan jadwal sehingga membuat para KPM menunggu ini merupakan hambatan atau keadaan yang menyebabkan pelaksanaan terganggu atau tidak terlaksana dengan baik.

## 2. Masih Ada Ketidak Tepat Sasaran

Penerima manfaat dari program bantuan pangan non tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan tersebut ditunjukkan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Dari hasil temuan dilapangan, Program BPNT di Kelurahan Mampotu masih ada ketidak tepat sasaran seperti yang disampaikan langsung oleh ibu Hj,Adriani Alimuddin page selaku anggota DPR dan ibu Rita sebagai KPM.

Menurut Hj. Adriani page

”Bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone belum bisa dikatakan efektif, karena masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan bantuan, juga sebaliknya masyarakat yang sudah dikatakan mampu masih menerima bantuan, dan di Kelurahan Mampotu adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau yang miskin.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Ibu Bayana (KPM Kelurahan Mampotu), *Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 januari february 2020.*

<sup>55</sup>HJ.Adriani Alimuddin Page (Anggota DPR), *Wawancara Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 28 february 2020.*

Hasil penelitian bahwa adanya kurang ketepatan pemberian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena masih memakai data lama dan berdasarkan observasi langsung masih adanya pilih kasih diberikan disebagian tempat di Kelurahan Mampotu sehingga aparat lebih mengedepankan keluarganya dahulu yang menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di bandingkan dengan warga lain meskipun sudah dinyatakan keluarga mampu.

“Wawancara dengan ibu Rita bahwa kebanyakan orang yang menerima bantuan tersebut menurut saya dia tidak termasuk kategori KPM karena dia punya mobil rumahnya masih sangat layak ditempati dan punya penghasilan, sedangkan ada yang saya liat warga yang layak menerima bantuan tapi faktannya dia tidak terima bantuan”<sup>56</sup>

### 3. Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Atau Terblokir/Eror Dan Kartu Hilang.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah pengganti Kartu Perlindung Sosial yang berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu. Setiap Kepala Keluarga akan mendapatkan KKS dan 1 sim card untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telpon di SIM tersebut juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran simpanan Keluarga Sejahtera.

Setiap keluarga diberikan perbulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Nantinya, warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi dari ponsel mereka. Dan sering sekali ditemukan kendala-kendala pada saat penerimaan bantuan tersebut diantaranya permasalahan kartu rusak, patah atau kartu hilang hal ini jika terjadi segera dilaporkan supaya tidak menghambat penerimaan bantuan.

---

<sup>56</sup>Ibu Muni (KPM Kelurahan Mampotu), *Wawancara* Di Kediaman KPM Di Kelurahan Mampotu pada tanggal 23 februari 2020.

Menurut Yuliana (Pendamping PKH Kelurahan Mampotu) mengatakan bahwa :

“Permasalahan ini sering terjadi sehingga menghambat KPM menerima bantuan, sehingga harus dilaporkan untuk pembuatan kembali KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)”<sup>57</sup>

Permasalahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimaksud oleh Yuliana selaku (pendamping PKH) seperti, kartu rusak, patah atau terblokir dan patah. apabila ditemukan hal tersebut diperlukan mekanisme penyelesaian dengan tahap: *Pertama*, KPM BPNT melaporkan permasalahan kartu rusak, patah, terblokir dan kartu hilang kepada Dinas Sosial Kabupaten/kota melalui pendamping sosial bantuan pangan sosial; *kedua*, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota melaporkan ke kantor cabang Bank penyaluran dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor kartu kombo serta melampirkan kartu rusak dan masalah kartu lainnya; *Ketiga*, Kantor Cabang Bank Penyaluran harus meninjau lanjut laporan tertulis harus mengganti kartu kombo yang rusak, terblokir dan hilang paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja). Namun, kartu hilang di beri biaya Rp. 15.000.00; *Keempat*, Kantor Cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pusat Bank Penyalur; *Kelima*, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota secara tertulis kartu kombo yang rusak, patah, terblokir dan yang hilang kepada Direktur yang menangani

---

<sup>57</sup>Yuliana ( Pendamping PKH Kelurahan Mampotu), *Wawancara* di kediaman pendamping PKH Kelurahan Mampotu pada tanggal 20 Januari 2020.

pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran; dan *Keenam*. Bank Penyalur Pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo yang rusak, patah,terblokir atau yang hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dengan jumlah sebesar Rp. 110.000, melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Mampotu , belum bisa dikatakan optimal atau belum berjalan dengan baik, sedangkan dimana program ini merupakan langkah pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mendorong keuangan inklusif ,dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang. permasalahan yang sering di dapat khususnya di Kelurahan Mampotu yaitu bantuan tersebut masih ada ketidak tepat sasaran atau adanya ketidak konsistenan jadwal penyaluran Bantuan setiap bulannya.
2. Penunjang dan Penghambat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. *Pertama*, faktor penunjang atau

Pendukung Program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone yaitu kebijakan dari pemerintah berupa program BPNT yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan, yang tidak lepas juga dengan adanya pendamping yang profesional dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten, ketersediaan data penduduk miskin. *Kedua*, faktor penghambat antara lain meliputi: a) Masih ada ketidak tepat sasaran, b) Adanya Ketidak Konsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulanya, c) Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Atau Terblokir/Eror Dan Kartu Hilang.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas terdapat beberapa implikasi penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Satuan pemerintah baik pusat hingga kelurahan/pedesaan maupun pendamping program BPNT, harus melakukan penguatan regulasi, serta evaluasi program BPNT guna memaksimalkan penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mampotu.
2. Perlunya pemahaman masyarakat terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kecamatan Amali supaya tidak terjadi kecemburuan sosial.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidak validan data.

4. Dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperlukan peningkatan nominal bantuan, apalagi jumlah anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerah itu berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- AB Syamsuddin, *Paradigma Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, Makassar: Shofia 2016.
- AB Syamsuddin, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Jawa Timur, Cet.I, Jakarta: Group National Publishing, 2007.
- AB Syamsuddin, *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*, Cet I, Jawa Timur: Wade, 2017.
- Adi Isbandi Rukminto, *Pekerjaan Sosial Dan Pembangunan Sosial*, Bandung Refika Aditama, 2015.
- Achmad Choesni Tubagus, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta, 2016.
- Arraiyayah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Cet I, Bandung : PT Refika Aditama 2021.
- Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai* , Jakarta: 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Karya Toha Putra, 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .Semarang: Toha Putra 2002.
- Endswarsa, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi , Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, aplikasi dan pemecahannya*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group 2011.
- Jamaludin Nasrullah Adon, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Cet 1: Bandung 2016.
- Kementerian Sosial Republic Indonesia, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011* . Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- Khomsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Cet.I Jakarta: Pustaka Obor, 2015.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial* . Jilid 1, Edisi 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

- Katsir, bin Isma'il, *Tafsir Al-Qur'anil Azhiim*, Balai Kajian Tafsir Al-qur'an Pase
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bahasa Indonesia 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- Muhammad Riski, *pengertian kesejahteraan*, [http:// id.m. Wikipedia](http://id.m.wikipedia.org). Definisi kesejahteraan. Com2016/07.Diakses pada tanggal 12 maret 2019
- Najmi Buyamin Pengertian Jaminan Sosial [Http://Jamsostek.Blospot.Com/2010/10/](http://Jamsostek.Blospot.Com/2010/10/) Apa Itu Jaminan Sosial.
- Rasyid M Abd.,*Perubahan Sosial dan Strategi Komunikasi*, Jawa Timur 2018.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung Refika Aditama,2012
- Suradi dan Mujiyadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Cet.I. Jakarta, P3KS,2009
- Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta, 2006
- Sumdiria, Haris. *Sosiologi Komunikasi Massa*, Bandung Simbiosa Rekatamu Media. 2014
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, “*Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*” Jakarta, 2017.
- Undang –Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan*.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## DOKUMENTASI



Gambar 1 wawancara Bapak Amirdin,SP,t.M.Si ( Lurah Mampotu)



Gambar 2 Bapak Aris (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)



Gambar 3 Ibu Nurhayati (Keluarga Penerima Manfaat)



Gambar 4 Hj. Adriani Alimudding Page (Tokoh Masyarakat)



Gambar 5 Yuliana (Pendamping Keluarga Harapan)



Gambar 6 Ibu Rita (penerima bantuan)

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRMALASARI
2. Profesi/ Status : MAHASISWA
3. Fakultas / Jurusan : FDIK / KEKOS
4. Semester : VIII
5. Alamat : TARETTA

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : MUNI
2. Profesi/ Jabatan : -
3. Umur : 60
4. Alamat : Tarretta
5. Tanggal Wawancara :

Untuk keperluan penyusun penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali,

2020

Informan

( MUNI )

Peneliti,

( Irmalasari )

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRMALASARI
2. Profesi/ Status : MAHASISWA
3. Fakultas / Jurusan : FOK / PMI KESSES
4. Semester : VIII
5. Alamat : MAMPOTU

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : Hs-Adriani Alimuddi Page
2. Profesi/ Jabatan : -
3. Umur : 35
4. Alamat : Mampotu
5. Tanggal Wawancara : 5 Maret 2020

Untuk keperluan penyusun penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali, 5 Maret 2020

Informan

  
(Hs-Adriani Alimuddin Page)

Peneliti,

  
(Irmalasari)



---

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRMALASARI
2. Profesi/ Status : MAHASISWA
3. Fakultas / Jurusan : FDK/PMI KESDS
4. Semester : VIII
5. Alamat : MAMPOTU

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : RITA
2. Profesi/ Jabatan : PENERIMA PKH
3. Umur : 29 Thn
4. Alamat : MAMPOTU
5. Tanggal Wawancara : 6 Maret

Untuk keperluan penyusunan penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali, 6 Maret 2020

Informan



( RITA )

Peneliti,



( Irmalasari )

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YULIANA IRMALASARI
2. Profesi/ Status : PENDAMPING PKH MAHASISWA
3. Fakultas / Jurusan : POK / PMI KESSOS
4. Semester : VIII
5. Alamat : MAMPOTU

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : YULIANA
2. Profesi/ Jabatan : PENDAMPING PKH
3. Umur : 25
4. Alamat : MAMPOTU
5. Tanggal Wawancara : 28 Februari

Untuk keperluan penyusunan penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali,

2020

Informan

  
( YULIANA )

Peneliti,

  
( Irmalasari )

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRMALASARI
2. Profesi/ Status : MAHASISWA
3. Fakultas / Jurusan : FDK / PMK ESRS
4. Semester : VIII
5. Alamat : TARETTA

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : AMIRDIN, SP. E. M. Si
2. Profesi/ Jabatan : LURAH MAMPOTU
3. Umur : 35 Thn
4. Alamat : MAMPOTU
5. Tanggal Wawancara : 29 februari 2020

Untuk keperluan penyusunan penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali, 29 Februari 2020

Informan

  
(AMIRDIN, SP. E. M. Si)

Peneliti,

  
(Irmalasari)

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Irmalasari
2. Profesi/ Status : Mahasiswa
3. Fakultas / Jurusan : FDK / PM KESSES
4. Semester : VIII
5. Alamat : Mangrove

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : BAYANA
2. Profesi/ Jabatan : PENERIMA DKH
3. Umur : 40
4. Alamat : MANGROVE
5. Tanggal Wawancara : 7 Maret

Untuk keperluan penyusunan penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali, 7 Maret 2020

Informan

  
( BAYANA )

Peneliti,

  
(Irmalasari)

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Irmalasari
2. Profesi/ Status : Mahasiswa
3. Fakultas / Jurusan : Dakwa dan komunikasi
4. Semester :
5. Alamat : Jember

Penulis tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan :

1. Nama Informan : NURHAYATI
2. Profesi/ Jabatan : -
3. Umur : 40
4. Alamat : TANETTA KEL. MAMPOTU
5. Tanggal Wawancara :

Untuk keperluan penyusunan penelitian .

Demikian keterangan wawancara ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Amali, 28, Februari 2020

Informan

  
( NURHAYATI )

Peneliti,

  
( Irmalasari )



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 456/S.01/PTSP/2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Bupati Bone

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Nomor : B-182/Un.6-DU.I/TL.00/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : IRMALASARI  
 Nomor Pokok : 50300116072  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Januari s/d 30 Februari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 22 Januari 2020

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Pastinggal

SIMAP PTSP 22-01-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.107/IIP/DPMPSTSP/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **IRMALASARI**  
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 50300116072  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Lingk. Taretta Kel. Mampotu Kec. Amali  
 Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP  
 KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MAMPOTU KECAMATAN AMALI  
 KABUPATEN BONE"**

Lamanya Penelitian : 27 Januari 2020 s/d 27 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Lurah Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 27 Januari 2020  
**KEPALA,**  
  
**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**  
 Pangkat Pembina Utama Muda  
 Nip. 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Amali Kab. Bone di Amali.
4. Lurah Mampotu Kec. Amali di Mampotu.
5. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Irmalasari biasa di sapa dengan nama Irma lahir di Taretta, 1 Juli 1998. Lahir dari keluarga yang sederhana, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Arifin dan Nurtang.

Penulis memulai proses pendidikanya di SD 124Mampotu dan selesai pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikanya di MTS Yapit Taretta pada tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di MA Yapit pada tahun 2016. Setelah tamat MA, Penulis melanjutkan pendidikanya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016 untuk Program strata S1 Jurusan PMI.Kons Kesejahteraan Sosial.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos), penulis melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone"di bawah bimbingan BapakDr. Syamsuddin AB, S.Ag.,M.Pddan Bapak Dr. Sakaruddin, M.Si.